

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian yang mengevaluasi dampak keragaman dewan dan kinerja lingkungan terhadap pelaporan karbon ini mencakup 27 perusahaan energi di BEI selama periode 2022-2024. Melalui prosedur *purposive sampling*, sebanyak 81 data panel telah diolah menggunakan *Fixed Effect Model* guna mendapatkan hasil estimasi yang akurat. Berdasarkan seluruh tahapan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan akhir mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong serta penghambat praktik pengungkapan emisi karbon di Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) *Board gender diversity* dalam temuan studi ini tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap kebijakan transparansi emisi karbon, yang berimplikasi pada penolakan hipotesis pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusivitas gender dalam jajaran dewan direksi maupun komisaris belum bertransformasi menjadi kekuatan pendorong dalam eskalasi pelaporan emisi di industri energi. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan keberlanjutan perusahaan pada sampel ini masih bersifat independen terhadap komposisi gender dalam struktur tata kelolanya.
- 2) *Board foreign diversity* tidak memiliki dampak signifikan terhadap keluasan pelaporan emisi karbon, yang berujung pada penolakan hipotesis kedua. Hal ini memberikan sinyal bahwa kehadiran figur asing dalam struktur dewan belum menjadi katalisator efektif dalam mentransfer praktik transparansi lingkungan global ke dalam konteks perusahaan energi di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengungkapan emisi masih cenderung didominasi oleh pertimbangan domestik dibandingkan pengaruh internasional yang dibawa oleh anggota dewan asing.
- 3) *Board education diversity* dalam studi kali ini memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pelaporan emisi karbon, sehingga

hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa keberagaman latar belakang akademik dalam jajaran dewan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dan mempertajam kualitas analisis strategis perusahaan. Heterogenitas intelektual ini menjadi stimulan bagi manajemen untuk mengadopsi transparansi lingkungan yang lebih menyeluruh melalui pengungkapan emisi karbon yang lebih komprehensif.

- 4) Kinerja lingkungan tidak memiliki dampak yang nyata secara statistik terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis keempat dinyatakan gugur. Temuan ini mengindikasikan bahwa perolehan peringkat PROPER yang memuaskan belum bertransformasi menjadi pendorong otomatis bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi karbon. Hal ini menyiratkan bahwa ketaatan lingkungan secara teknis masih dipandang sebagai kewajiban terpisah dari praktik pelaporan emisi secara sukarela.
- 5) Hasil pengujian pada variabel kontrol mengonfirmasi bahwa skala perusahaan (*firm size*) tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan kebijakan pelaporan karbon. Sebaliknya, usia perusahaan (*firm age*) terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap keluasan informasi yang disampaikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa durasi operasional perusahaan sebagai emiten di bursa memperkuat dorongan untuk melakukan pengungkapan emisi. Langkah ini diambil sebagai strategi pencapaian legitimasi serta bentuk responsivitas terhadap tuntutan para pemangku kepentingan yang semakin meningkat seiring bertambahnya umur perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang berpotensi memengaruhi generalisasi temuan dan perlu menjadi atensi bagi peneliti mendatang. Kendala utama berkaitan dengan aksesibilitas data, di mana sejumlah perusahaan tidak memublikasikan laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan secara konsisten pada platform resmi perusahaan atau portal Bursa Efek Indonesia selama periode observasi. Selain itu, kriteria sampel yang mengharuskan partisipasi perusahaan

dalam program PROPER turut membatasi cakupan populasi, sehingga berdampak pada jumlah amatan yang dapat dianalisis dalam model penelitian ini. Tidak semua perusahaan mengikuti PROPER setiap tahun dan hanya anak perusahaan atau unit operasional yang berpartisipasi dalam program tersebut membuat berkurangnya sampel lebih banyak, sehingga terdapat ketidakkonsistenan keikutsertaan dan celah data yang dapat memengaruhi stabilitas skor. Berdasarkan keterbatasan 2 laporan dan keikutsertaan PROPER, jumlah observasi dalam penelitian hanya mencakup 81 data dari 27 perusahaan selama tiga tahun, sehingga variasi data relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan beberapa variabel tidak menunjukkan signifikansi yang kuat. Kedua, penelitian ini belum mempertimbangkan variabel eksternal seperti tekanan regulasi, eksposur media, atau sertifikasi ESG, yang menurut penelitian terdahulu berpotensi memengaruhi pengungkapan karbon. Tidak dimasukkannya variabel-variabel tersebut dapat menyebabkan model kurang komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *disclosure*.

5.3 Saran

Hal yang dapat diberikan peneliti sebagai saran berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Guna memperkaya literatur terkait transparansi lingkungan, studi selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel ke sektor-sektor strategis lainnya atau perusahaan yang terintegrasi dengan mekanisme Bursa Karbon Indonesia. Penambahan durasi penelitian juga dipandang perlu untuk meningkatkan keragaman sampel dan kedalaman analisis. Dengan cakupan sektoral yang lebih heterogen dan periode pengamatan yang lebih panjang, diharapkan hasil penelitian dapat menyajikan pola perilaku perusahaan yang lebih komprehensif terhadap isu perubahan iklim.
 - b. Pengembangan model penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menyertakan faktor tekanan media (eksposur media) sebagai prediktor tambahan dalam memengaruhi kebijakan lingkungan perusahaan. Pendekatan kuantifikasi melalui agregat berita lingkungan, baik secara

absolut maupun menggunakan logaritma natural, diharapkan dapat memberikan presisi yang lebih baik dalam analisis. Selain itu, penggunaan komite audit sebagai variabel moderasi patut dipertimbangkan untuk melihat pengaruh interaksi antara fungsi pengawasan internal dengan variabel-variabel independen utama dalam meningkatkan akuntabilitas karbon.

2) Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan meningkatkan kapasitas dewan dengan memperhatikan keberagaman tingkat pendidikan yang relevan dengan keberlanjutan, manajemen risiko, dan tata kelola lingkungan, serta memperkuat komitmen terhadap transparansi dengan menyajikan pelaporan emisi karbon yang berkualitas sebagai bagian dari strategi reputasi dan legitimasi publik. Selain itu, perusahaan perlu memastikan konsistensi penerbitan laporan keberlanjutan dan menyediakan data emisi yang lebih rinci, akurat, serta terverifikasi agar dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

3) Bagi Investor

Investor disarankan untuk menjadikan informasi terkait transparansi emisi karbon sebagai salah satu indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Investor perlu menelaah laporan keberlanjutan secara langsung dan tidak semata-mata mengandalkan skor PROPER, karena kinerja lingkungan terbukti tidak selalu diikuti oleh pelaporan emisi yang memadai. Dengan memperhatikan kualitas pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari analisis risiko dan tata kelola berkelanjutan, investor dapat mengidentifikasi perusahaan dengan akuntabilitas lingkungan yang lebih kuat dan menyesuaikan keputusan investasi sesuai prinsip ESG dan preferensi portofolio rendah karbon.

4) Bagi pemerintah

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar faktor tata kelola, seperti keberagaman *gender*, kewarganegaraan, dan kinerja lingkungan, belum mampu mendorong perusahaan meningkatkan pengungkapan emisi karbon, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang

bersifat wajib dan terstruktur terkait pelaporan emisi karbon. Pemerintah dan otoritas seperti KLHK, OJK, dan BEI diharapkan mengembangkan standar pelaporan yang seragam dan selaras dengan praktik internasional, memperkuat mekanisme verifikasi data, serta mendorong program peningkatan kapasitas bagi perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan insentif maupun disinsentif untuk meningkatkan kepatuhan, sekaligus memasukkan aspek keahlian dan tingkat pendidikan dewan dalam pedoman tata kelola untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas emisi yang lebih baik.